

Indonesia Dinilai Bisa Jadi Model

JAKARTA, KOMPAS — Indonesia dinilai dapat menjadi model bagi negara lain dalam hal penegakan hak asasi manusia. Sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim, Indonesia dianggap sebagai negara yang terbuka. Kepeloporan Indonesia dalam menangani masalah di sejumlah kawasan menjadi modal penting menciptakan perdamaian dunia.

Pandangan ini disampaikan Komisioner Tinggi HAM Persekitaran Bangsa-Bangsa (PBB) Zeid Ra'ad Al Hussein se usai diterima Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/2).

"Komisioner" mengharapkan Indonesia bisa menjadi contoh sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, terutama dalam menangani beberapa isu yang terkait dengan

HAM," kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly yang mendampingi Presiden menerima Zeid Ra'ad.

Perbincangan antara delegasi Komisi Tinggi HAM PBB dan Presiden Jokowi kemarin berlangsung hangat. Salah satu agenda pembicaraan itu menyangkut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sedang dibahas pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam pertemuan itu disepakati akan ada diskusi lebih lanjut mengenai hal itu antara Kementerian Hukum dan HAM dan Komisi Tinggi HAM PBB. "Pesan Pak Zeid, tidak boleh ada diskriminasi kepada siapa pun," kata Yasonna.

Kepada Presiden, Komisi Tinggi HAM mengapresiasi peran Indonesia dalam membantu masalah pengungsi Rohingya dari Myanmar di Bangladesh.

Komisi Tinggi HAM PBB terus mendorong Indonesia untuk berperan di sana karena masih banyak persoalan yang harus diselesaikan menyangkut pengungsi Rohingya.

Amanat konstitusi

Merespons keinginan Zeid yang mendorong kepeloporan Indonesia di panggung internasional, Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir mengatakan, Indonesia memang berkomitmen untuk menegakkan HAM. Komitmen tersebut, kata Fachir, merupakan amanat konstitusi yang harus dilaksanakan. Memang dalam pelaksanaannya tidak selalu berjalan mulus. Pemerintah terus berjuang untuk memenuhi hak-hak kaum minoritas dan masyarakat termarginalkan. "Karena itu adalah kewajiban negara," kata Fachir.